

**PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA
BAHARI DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALI
KOTA PADANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN KERJA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk memenuhi Sebagai Syarat
Mencapai gelar Sarajana Hukum*



Disusun Oleh:

**FITRIA HAYANI
1410012111359**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

REG NO 03/ SKRIPSI/ HTN/ FH/ II-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

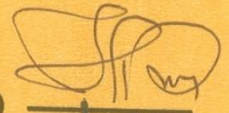
Reg. No. : 03/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **FITRIA HAYANI**
Npm : **1410012111359**
Program kehususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan**

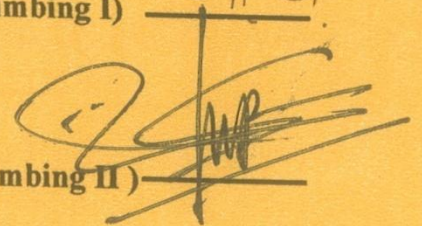
Telah disetujui pada hari **Senin** Tanggal **Dua Tiga Bulan Januari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan di depan tim penguji

1. **Nurbeti S.H., M.H**

(Pembimbing I)



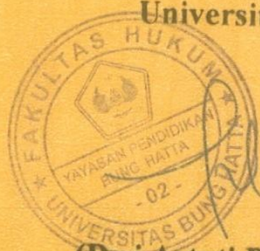
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Pembimbing II)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

Ketua Bagian

Hukum Tata Negara



(Suamperi, S.H, M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


Reg. No. : 03/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **FITRIA HAYANI**
Npm : **1410012111359**
Program kehususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari **Senin** Tanggal **Lima** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (Ketua)
2. **Suamperi, S.H., M.H** (Sekretaris)
3. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (Anggota)
4. **Nurbeti, S.H., M.H** (Anggota)
5. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Anggota)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

**PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA
BAHARI DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA PADANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Fitria Hayani ¹, Nurbeti, S.H., M.H., ¹

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., ¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Fitriahayani18@gmail.com

ABSTRAK

Wisata bahari merupakan suatu bentuk kegiatan wisata atau refreking yang berkaitan dengan air, pantai, laut dan danau. Perwako Nomor 83 Tahun 2016 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Perkembangan dan pemanfaatan kawasan Kota Padang mengalami dalam pengembangan wisata bahari, terlihat belum adanya penyediaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pengunjung atau wisatawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari. 2). Kendala-kendala apa yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari. 3). Upaya-upaya apa yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara kepada pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Hasil penelitian adalah: 1). Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada. 2). Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu usaha-usaha pariwisata yang di kelola oleh masyarakat yang tidak mempunyai izin. 3). Upaya-upaya yang telah dilakukan ialah dengan membangun sadar wisata terutama kawasan wisata pantai yang dikelola masyarakat.

Kata Kunci: Peranan, Dinas, Pariwisata, Kebudayaan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis sampaikan kehadirat Allah Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia- Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN”**. Sebagai salah satu tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis yang miliki sendiri. Penulis menyadari bahwa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak mungkin skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nurbeti, S.H., M.H., Pembimbing I dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., Pembimbing II sekaligus Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dengan cinta dan kasih sayang selalu dan tidak henti-hentinya memberikan dorongan, bimbingan, semangat yang luar biasa. Dengan terselesaikannya skripsi ini, merupakan salah satu wujud perjuangan terbaik yang penulis persembahkan khususnya kepada orang tua.

Semoga ini akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka atas semua yang penulis lakukan. Pada kesempatan ini izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H. Pembimbing Akademik (PA)
3. Seluruh Staf pengajar beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala-Kepala Bagian dan Seluruh pegawai staf yang meluangkan waktu, serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Mama Erna Marlina, Papa Rusli Ujang (Alm) dan Papi Edison yang selalu memberikan dukungan, serta pengorbanan segenap jiwa dan raga dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
6. Kakak Rita Purnama Sari dan Adik Rahmat Hidayat yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Yogi Rahmadi yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu Elvi Penulis ucapkan terima kasih yang selalu menasehati dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Jonathan Evan Halim, Ashfihani Basnur, Delfis Sanur, Defnisrimelisa, Rika Noviyanita penulis ucapkan terima kasih yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

10. Julio Morinas, Mecy Iskandar, Idul, Anja, Aqsa Kak Tia penulis ucapkan terima kasih yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2014 tak terkecuali, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesuksesan selalu mengiringi kita bersama.
12. Kepada rekan-rekan kader HMI cabang Padang dan Sahabat-sahabat di Komisariat Himpunan Mahasiswa Islam selingkup Universitas Bung Hatta dan senior yang telah berjasa mendampingi penulis dalam belajar organisasi Kakanda Rian Saputra, Tri Rengga, Fardi, Yoga, penulis ucapkan terima kasih.
13. Presiden Mahasiswa Universitas Bung Hatta periode 2016/2017 dan seluruh rekan-rekan lembaga penulis ucapkan terima kasih yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi kepada penulis.

Tiada manusia dilahirkan dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sang penulis harapkan guna kempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis memohon kehadiran Allah Yang Maha Kuasa semoga amal dan kebaikan-kebaikan semuanya akan dibalas-Nya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Padang, Januari 2018
Penulis

Fitria Hayani
1410012111359

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Dinas Pariwisata Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan	12
1. Tugas dan Wewenang Dinas Pariwisata	12
2. Kedudukan Dinas Pariwisata	38
3. Dasar Hukum Dinas Pariwisata	38
B. Tinjauan Umum Tentang Wisata Bahari	
1. Pengertian Wisata Bahari	38
2. Manfaat Wisata Bahari.....	40
3. Pengaturan Wisata Bahari Di Indonesia	41
C. Tinjauan Tentang Dinas Pariwisata Di Kota Padang	
1. Tugas Dan Wewenang Dinas Pariwisata	41
2. Standar Pelayanan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang...	44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang	46
1. Gambaran Umum Mengenai Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang	46
2. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.....	58
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Padang Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang	61
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang	62

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia pariwisata dikenal berbagai istilah yang berhubungan dengan pariwisata, diantaranya adalah kepariwisataan, pariwisata, wisata, daya tarik wisata dan yang berhubungan dengan pariwisata, semuanya telah dijelaskan dalam Bab I Pasal I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal I Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pengertian Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Adapun pengertian Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalu lintas orang-orang dari luar ke suatu Negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan, minum, transportasi, akomodasi dan objek atau hiburan.¹

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal I Angka 1 pengertian Wisata memuat sebagai berikut :

“Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.”

¹Violetta Simatupang, 2009. *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, Bandung : P.T. Alumni, hlm. 24.

Dijelaskan dalam Pasal I Angka 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata pengertian Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.²

Wisata pantai atau biasa disebut Wisata Bahari menjadi objek wisata yang diminati Wisatawan saat sekarang ini. Dalam upaya mengembangkan dan memanfaatkan wisata bahari sebagai objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pantai barat Kota Padang berupa kekayaan alam yang indah, keragaman flora dan fauna seperti terumbu karang dan berbagai jenis ikan hias. Wisata bahari identik dengan wisata Pulau yang selalu menarik perhatian Wisatawan.

Sektor pariwisata di Kota Padang sangat penting dikarenakan kota Padang banyak memiliki objek wisata yang sangat bagus dan berkualitas. Objek pariwisata tersebut dapat memberikan *income* yang besar untuk Kota Padang. Hal ini disebabkan masyarakat Kota Padang yang suka mengunjungi objek-objek wisata, selain di sektor pariwisata harus di kembangkan karena dapat membuat kota Padang semakin maju dan berkembang, Bagus ataupun majunya suatu daerah juga tergantung dari sektor pariwisata daerah tersebut karena jika pariwisata maju

²Violetta Simatupang, 2015. *Hukum Kepariwisata Berbasis aeakspredisi Budaya Tradisional*, Bandung : P.T. Alumni, hlm.59.

makin besarlah pendapatan suatu daerah dan penduduk di tempat objek wisata tersebut. Saat ini pariwisata sudah diakui dunia Internasional sebagai sektor penggerak perekonomian dengan bahan baku yang tidak kunjung habis.³

Pentingnya sektor pariwisata di Kota Padang, karena Kota Padang sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pantai Barat Pulau Sumatera, mempunyai potensi yang cukup besar terutama di bidang kepariwisataan dan kelautan. Kedudukannya sangat strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan serta transportasi regional di Sumatera Barat merupakan nilai-nilai lebih dari daerah-daerah lain di Sumatera Barat.⁴

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;

³Abdul, Hanif Alkhar. 2016. *Perencanaan Pembangunan Sektor Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Padang*. Scholar.unand.ac.id. Diakses Pada Hari Selasa 31 Oktober 2017, Pada Pukul 13.01 WIB

⁴Ibid

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pada umumnya, Di dunia itu harusnya yang dominan wisata baharinya adalah Indonesia, karena lautannya paling besar, luas dan banyak pulau-pulau kecil. Dengan kekayaan alam laut Indonesia bisa memadukan kekayaan hayati secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi sumber daya pesisir dan lautnya yang demikian besar, maka pengembangannya diarahkan pada peruntukan perikanan dan pariwisata (wisata bahari). Pengembangan wisata bahari pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan secara terpadu untuk kegiatan pariwisata. Potensi berbasis wisata bahari ini diharapkan dapat memenuhi dalam melakukan pengembangan wisata bahari sebagai wujud pemanfaatan potensi sumber daya alam pesisir dan dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.⁵

Tabel 1
Jenis Pariwisata Bahari di Kota Padang

No	Jenis Pariwisata Bahari	Luas	Keterangan
1	Pulau Pasumpahan	2,5 hektar	-
3	Pulau Pamutusan	8 hektar	-
4	Pulau Sirandah	10 hektar	-
5	Pantai Air Manis	1 hektar	-
6	Pantai Caroline	150 M	-
7	Pantai Sako	6.000 M2	-
8	Pantai Nirwana	20 hektar	-
9	Pantai Pasir Jambak	3,5 hektar	-
10	Pantai Pasir Putih Padang	5,13 hektar	-
11	Pantai Padang	2000 M	-

Sumber : Link Internet diakses tanggal 15 November 2017

⁵<http://m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/07/20/ote942284-indonesia-harus-jadi-kawasan-wisata-bahari-dunia> Diakses Pada Hari Selasa 31 Oktober 2017, Pada Pukul 13.07 WIB

Pembangunan pariwisata bahari, khususnya di Kota Padang belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan belum terwujudnya strategi pembangunan kegiatan pariwisata dalam pengembangan wisata bahari. Untuk mewujudkan hal tersebut terdapat dua faktor penting dalam pembangunan kegiatan pariwisata. *Pertama*, faktor internal berupa strategi terukur manajemen daya tarik objek wisata yang terkait mulai dari aspek teknis, strategi jasa pelayanan sampai strategi penawaran. *Kedua*, faktor eksternal berupa dukungan perangkat kebijakan dari pemerintah serta penciptaan iklim keamanan yang kondusif bagi kegiatan pariwisata. Dalam membenahi strategi pengembangan pariwisata bahari, maka secara teknis harus dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wisata bahari dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengembangan wisata bahari secara terpadu serta penyediaan sistem informasi pariwisata dan program promosi yang tepat.⁶

Perkembangan kawasan Kota Padang untuk pengembangan wisata bahari yang penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Perkembangan dan pemanfaatan kawasan Kota Padang mengalami dalam pengembangan wisata bahari, terlihat dengan belum adanya penyediaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan bagi pengunjung atau wisatawan untuk. Selain itu masalah sampah di Pantai Padang juga menjadi masalah tersendiri yang kondisinya kurang terurus dengan baik. Hal ini terbukti dengan banyaknya pedagang kaki lima yang ada disepanjang jalan pantai Padang, yang mengakibatkan kebersihan dan kenyamanan yang dirasakan oleh pengunjung semakin berkurang. Hal tersebut tentunya perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Padang khususnya

⁶<http://www.google.com/search?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=ATJEH+UNDERCOVER> Diakses Pada Hari Selasa 7 November 2017, Pada Pukul 08.00 WIB

peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur di kawasan pantai Padang hendaknya menjadi prioritas utama yang dilaksanakan.⁷Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul **“PERANAN DINAS PARIWISATA DALAM PENGEMBANGAN WISATA BAHARI DI KOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN”**

B. Rumusan Masalah

Setiap karya tulis ilmiah didasari dengan rumusan permasalahan yang merupakan suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya sehingga dapat dijabarkan apa-apa yang ingin dicapai dalam penelitian ilmiah yang dimaksud.⁸ Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Wisata Bahari di Kota Padang?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam pengembangan Wisata Bahari di Kota Padang?
3. Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari di Kota Padang?

⁷www.academia.edu/18377586/Perkembangan_Pemanfaatan_Kawasan_Pantai_Padang_dan_Dampaknya_terhadap_Lingkungan. Diakses Pada Minggu 5 November 2017 Pukul 17.03

⁸ Burhan Ashsofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan keempat, Rienka Cipta, Jakarta, hlm 117-118

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan diatas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari di Kota Padang ?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang dalam pengembangan Wisata Bahari di Kota Padang ?
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan Wisata Bahari di Kota Padang ?

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relavan, Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu segala yang diamati.⁹ Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis sosiologis artinya penulis memperoleh data dari lapangan atau (*Sociological Research*) yaitu penelitian khususnya berkaitan dengan Peranan Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota

⁹ Afifudin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 36.

Padang Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau gejala lain dalam masyarakat.¹⁰ Karena dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Peranan Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Wisata Bahari Di Kota Padang Berdasarkan Sumber Data.

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data yang meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi terkait wisata bahari dan instansi lainnya pada dinas Kepariwisata Kota Padang.¹¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diolah atau yang didapat dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan segera, baik dan bentuk

¹⁰Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Bumi Initama Sejahtera, hlm. 34

¹¹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm 106

isi data sekunder telah dibentuk dan diisi peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.¹²

Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen Negara Hukum Demokratis, yaitu :
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
 - b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Kerja Dinas Daerah
 - c) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti : buku-buku atau literature, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, symposium dan loka karya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat

¹²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm

dipertanggung jawabkan muatannya dalam media massa lainnya baik elektronik maupun cetak lainnya baik elektronik maupun cetak.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum Data sekunder merupakan penelitian perpustakaan yaitu berupa penelitian bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

- a. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹³ Wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam serta digunakan sistem yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang di teliti, tetapi masih membutuhkan informasi dan informan lainnya sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada saat penelitian. Orang yang menjadi objek wawancara adalah Bapak Ludi Anwar sebagai

¹³Nomensen Sonamo, Op, Cit, hlm, 59

Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Padang serta staff dan divisi yang memiliki kaitan dengan yang akan diteliti.

- b. Studi Dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas yang diperoleh selama penelitian pada kantor Dinas Pariwisata Kota Padang.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah.¹⁴

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.22